



**BADAN  
PANGAN  
NASIONAL**

**NATIONAL  
FOOD  
AGENCY**

# **PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA) KOTA BANDAR LAMPUNG**



**TAHUN 2022**



**DINAS PANGAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**SAMBUTAN Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

**DALAM RANGKA PENERBITAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN  
PANGAN/FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS ( FSVA ) KOTA BANDAR  
LAMPUNG TAHUN 2022**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

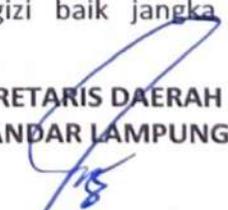
Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita mendapat kenikmatan dan berada dalam keadaan sehat wal Afiat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ketahanan pangan akan mudah terwujud, apabila antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat bersama-sama berkomitmen, konsisten dan bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan, bukan kondisi yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Artinya, bahwa keberhasilan pencapaian penyediaan pangan, belum sepenuhnya menjamin tercapainya ketahanan pangan. Hal ini mengingat pangan tersebut, belum tentu sepenuhnya dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting adanya untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG**



**SUKARMA WIJAYA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Merupakan instrument untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan dan tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di wilayah secara komprehensif. FSVA disusun menggunakan 5 indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan (akses) dan pemanfaatan pangan.

Laporan FSVA Kota Bandar Lampung ini tidak mungkin dapat tersusun tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Badan Pangan Nasional (BAPANAS) atas support anggaran dan bimbingannya;
2. Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Kota Bandar Lampung Tahun 2022, atas peran aktif, kerjasama, support data, dan dukungannya dalam penyusunan FSVA;
3. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung atas bantuan dan bimbingannya;
4. Semua pihak yang memberikan support data pendukung dalam penyusunan FSVA ini, antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Bagian Pemerintahan;
5. Seluruh pegawai Dinas Pangan Kota Bandar Lampung atas perhatian, bantuan, dan dukungannya;

Laporan FSVA ini merupakan potret terkini status ketahanan pangan pada tingkat wilayah kelurahan Kota Bandar Lampung. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kerja pembangunan Kota Bandar Lampung kedepan, agar seluruh wilayah di Kota Bandar Lampung tahan pangan dan setiap individu sehat, cerdas, aktif, dan produktif. Terimakasih.

KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA BANDAR LAMPUNG



I KADEK SUMARTA

## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kota Bandar Lampung merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kelurahan di Kota Bandar Lampung. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. 5 (Lima) indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kota Bandar Lampung. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Kecamatan dan kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 32 kelurahan dari 126 kelurahan (29 %) yang terdiri dari 4

kelurahan (3,2%) Prioritas 1; 11 kelurahan (8,7%) Prioritas 2; dan 17 kelurahan (13,5%) Prioritas 3. Kelurahan prioritas 1 berada di Kecamatan Teluk Betung Barat (Kel. Keteguhan); Kecamatan Panjang (Kel. Srengsem); Kecamatan Kemiling (Kel. Kedaung) dan Kecamatan Sukabumi (Kel. Way Gubak). Kelurahan prioritas 2 sebanyak 3 kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat yaitu Kelurahan Kuripan, Sukarame II dan Batu Putu; 1 kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Timur yaitu Kelurahan Way Tataan; 1 Kelurahan di Kecamatan Panjang yaitu Kelurahan Way Lunik; 1 Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat yaitu Kelurahan Sukadanaham, 1 Kelurahan di Kecamatan Kemiling yaitu Kelurahan Sumber Agung; 1 Kelurahan di Kecamatan Rajabasa yaitu kelurahan Rajabasa Jaya. Kelurahan prioritas 3 tersebar 2 Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Barat, tersebar 2 Kelurahan Teluk Betung Timur; 1 Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, 1 Kelurahan di Kecamatan Bumi Waras; 2 Kelurahan di Kecamatan Panjang, 2 Kelurahan di Kecamatan Kedamaian, 1 Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, 1 Kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat; 2 Kelurahan di Kecamatan Langkapura, 1 Kelurahan di Kecamatan Langkapura; 1 Kelurahan di Kecamatan Rajabasa, 3 Kelurahan di Kecamatan Sukabumi;

7. Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh: (1) tingginya jumlah penduduk yang tidak sejahtera (2) banyaknya rumah tangga tanpa akses air bersih, (3) kurangnya tenaga kesehatan, dan (4) jumlah sarana penyedia pangan yang kurang mencukupi. Perbedaan prioritas pada daerah rawan pangan di sebabkan adanya perbedaan rasio hasil analisis indikator penyebab kerawanan pangan.
8. Karakteristik Kelurahan rentan pangan ditandai dengan; (1) Kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut, (2) Banyaknya rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih, (3) masih kurangnya sarana dan prasarana penyedia pangan di wilayah tersebut (4) Masih banyaknya keluarga dengan kondisi tidak sejahtera.
9. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten/kota diarahkan pada kegiatan:
  - a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, seminar, bimtek dan lain sebagainya;
  - b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
  - c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih;
  - d. Peningkatan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan, dalam upaya perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat
  - e. Optimalisasi anggaran ketahanan pangan, pemantauan dan stabilisasi harga pangan serta pengembangan cadangan pangan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Kerangka Konsep Katahanan Pangan dan Gizi 4
1.3	Metodologi 8
<b>BAB 2</b>	<b>KETERSEDIAAN PANGAN</b> 13
2.1	Sarana dan Prasana Penyedia Pangan 13
2.2	Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan 16
<b>BAB 3</b>	<b>AKSES TERHADAP PANGAN</b> 19
3.1	Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah 19
3.2	Akses Transportasi 22
3.3	Strategi Peningkatan Akses Pangan 23
<b>BAB 4</b>	<b>PEMANFAATAN PANGAN</b> 25
4.1	Akses Terhadap Akses Air Bersih 25
4.2	Rasio Tenaga Kesehatan 27
4.3	Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan 29
4.4	Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan 33
<b>BAB 5</b>	<b>KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT</b> 40
5.1	Kondisi Ketahanan Pangan 41`
5.2	Faktor Penyebab Kerentanan Pangan 45
<b>BAB 6</b>	<b>REKOMENDASI KEBIJAKAN</b> 47
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1.	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	6
Gambar 2.1	Grafik Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga	14
Gambar 2.2	Peta Sebaran Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2021	15
Gambar 3.1	Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	22
Gambar 3.2	Peta Indikator Rasio Penduduk Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2021	23
Gambar 3.3	Peta Indikator Kelurahan Yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Tahun 2021	24
Gambar 4.1	Grafik Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2021	26
Gambar 4.2	Peta Indikator Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Kota Bandar Lampung Tahun 2021	27
Gambar 4.3	Grafik Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2021	28
Gambar 4.4	Peta Indikator Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Tahun 2021	29
Gambar 4.5	Persentase Balita Gizi Kurang (BB/U), Stunting/Pendek (TB/U), dan Kurus (BB/TB) Tahun 2021	31
Gambar 4.6	<i>Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021</i>	33
Gambar 5.1	Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kota Bandar Lampung 2022	40
Gambar 5.2	Sebaran Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas Tahun 2021	42
Gambar 6.1	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	47

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Indikator FSVA Kabupaten 2021	9
Tabel 1.2	Bobot Indikator Individu	12
Tabel 2.1	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan Berdasarkan Prioritas	14
Tabel 3.1	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung, 2017--2021	20
Tabel 3.2	Range Rasio, Jumlah dan Pertsentase Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	20
Tabel.3.3	Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	21
Tabel 4.1	Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas	26
Tabel 4.2	Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan diKelurahan Berdasarkan Skala Prioritas	28
Tabel 4.4	Rekapitulasi Prevelensi Stunting Perkecamatan diKota Bandar Lampung Tahun 2021	35
Tabel 5.1.	Sebaran Jumlah kelurahan berdasarkan Prioritas	41
Tabel 5.2	Rata-Rata Skor dan indeks Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pada Kelurahan Rentan Pangan (Prioritas 1—3)	46
Tabel 5.3	Rata-Rata Skor dan indeks Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pada Kelurahan Rentan Pangan (Prioritas 4—6)	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan total penduduk pada tahun 2021 sebesar 1.092.450 jiwa (Disdukcapil 2022) dan memiliki wilayah seluas 197,22 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5<sup>o</sup>20' sampai dengan 5<sup>o</sup>30' Lintang Selatan dan 105<sup>o</sup>28' sampai dengan 105<sup>o</sup>37' Bujur Timur. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 19.722 Ha (197,22 KM<sup>2</sup>) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM<sup>2</sup> yang terdiri atas Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada sebanyak 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700m diatas permukaan laut. Di tengah-tengah kota mengalir beberapa sungai dan sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan. Topografi Kota Bandar Lampung terdiri dari: daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian Selatan dan Panjang, daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian Utara, daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serompok dibagian timur, dan Teluk Lampung dan pulau pulau kecil dibagian Selatan.

Pada tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan Kota Bandar Lampung sebesar 61.502,42 miliar rupiah. Ekonomi Kota Bandar

Lampung 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 21,09 persen.

Perekonomian Kota Bandar Lampung tergantung pada sektor industri pengolahan yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Akan tetapi sektor ini tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2021 peranannya sebesar 21,09% dari 20,97% pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor industri pengolahan mengalami peningkatan peranan.

Selain sektor industri pengolahan sektor yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 11,42% dari tahun 2020 sebesar 10,98%; sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dari 13,34% menjadi 13,80%. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor: pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,76%, menjadi 3,71%, pertambangan dan penggalian sebesar 3,56% menjadi 3,32%, pengadaan listrik dan gas sebesar 0,12% menjadi 0,11%; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 2,57% menjadi 2,49%; informasi dan komunikasi sebesar 6,43% menjadi 6,33% dan jasa keuangan sebesar 5,12% menjadi 5,10%; real estate sebesar 6,03% menjadi 5,88%; jasa perusahaan dari 0,35% menjadi 0,34%; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan social wajib dari 5,92% menjadi 5,75%; jasa pendidikan dari 3,66% menjadi 3,57%; dan jasa lainnya dari 1,64% menjadi 1,56%. Sedangkan sektor kesehatan menunjukkan peran yang sama pd tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 2,10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk

mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2022.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten/Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan.

Pengembangan FSVA tingkat desa/kelurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten/kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

## **1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI**

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO<sup>1</sup> mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

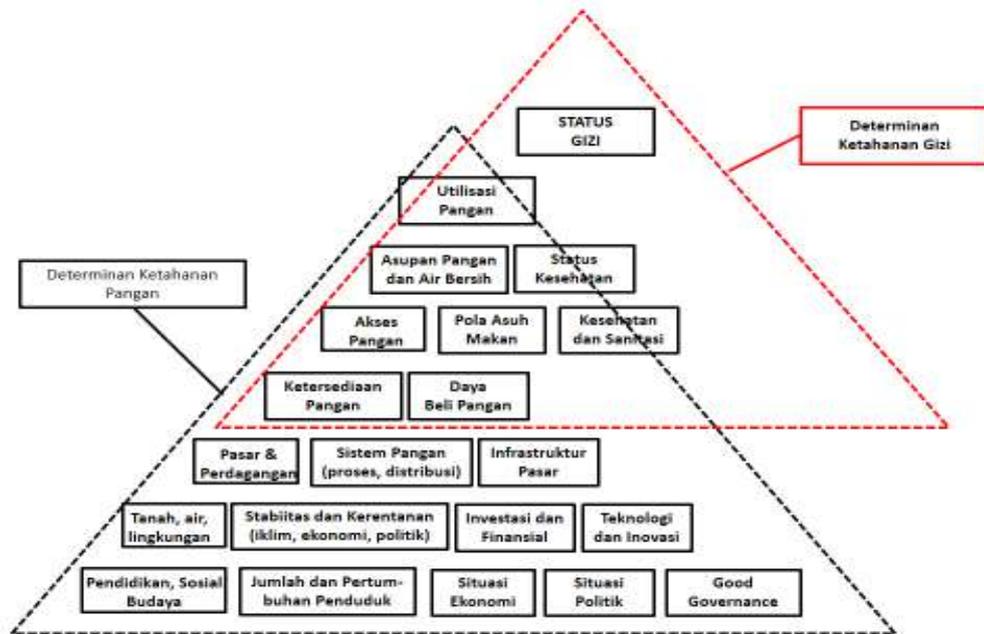
Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013<sup>2</sup> juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

<sup>2</sup> Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

**Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

**Pemanfaatan pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

**Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk

memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### 1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua

indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

**Tabel 1.1 Indikator FSVA Kabupaten Tahun 2022**

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2018
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2021, BPS Jumlah Rumah Tangga 2021 dari Disdukcapil, BPS
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021 Jumlah Penduduk Desa dari Disduksapil, BPS 2021
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia	Potensi Desa 2021, BPS

Indikator	Definisi	Sumber Data
	angkutan umum	
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2021, BPS, Dinas Kesehatan 2021

**Untuk wilayah perkotaan, dikarenakan bukan merupakan daerah produksi, maka indikator Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk ditiadakan, sehingga hanya mengukur 5 indikator saja.**

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis data indikator dalam penyusunan FSVA yaitu:

### **1. Analisis Indikator Individu**

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

### **2. Analisis Komposit**

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek

ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- $Y_j$  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- $a_i$  : Bobot masing-masing indikator
- $X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

**Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu**

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>	<b>1/3</b>
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>	<b>1/3</b>
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>	<b>1/3</b>

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i c_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

$K_j$ : *cut off point* komposit ke-J

$a_i$ : Bobot indikator ke-i

$c_{ij}$ : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-i kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada

desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

### **3. Pemetaan**

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

## **BAB 2**

### **KETERSEDIAAN PANGAN**

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

#### **2.1. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan**

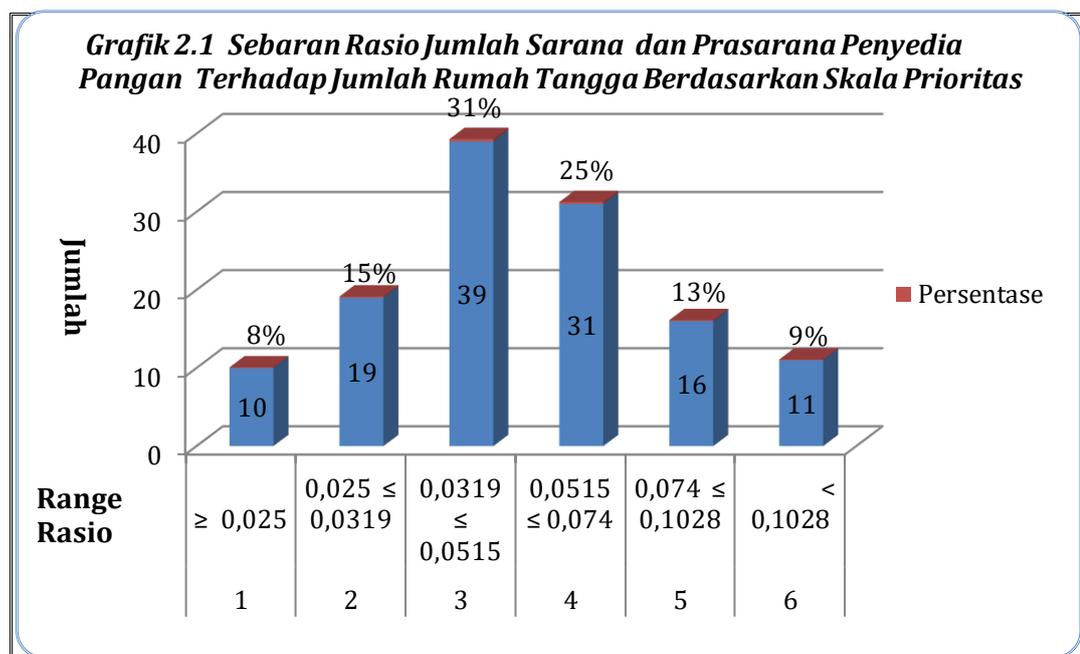
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana

dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut.

Dari 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung, 9 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (7,01 %), 12 kelurahan prioritas 2 (9,5 %) dan 41 kelurahan prioritas 3 (32,5%). Dibawah ini adalah hasil analisis indikator rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga kelurahan di Kota Bandar Lampung (Tabel 2.1).

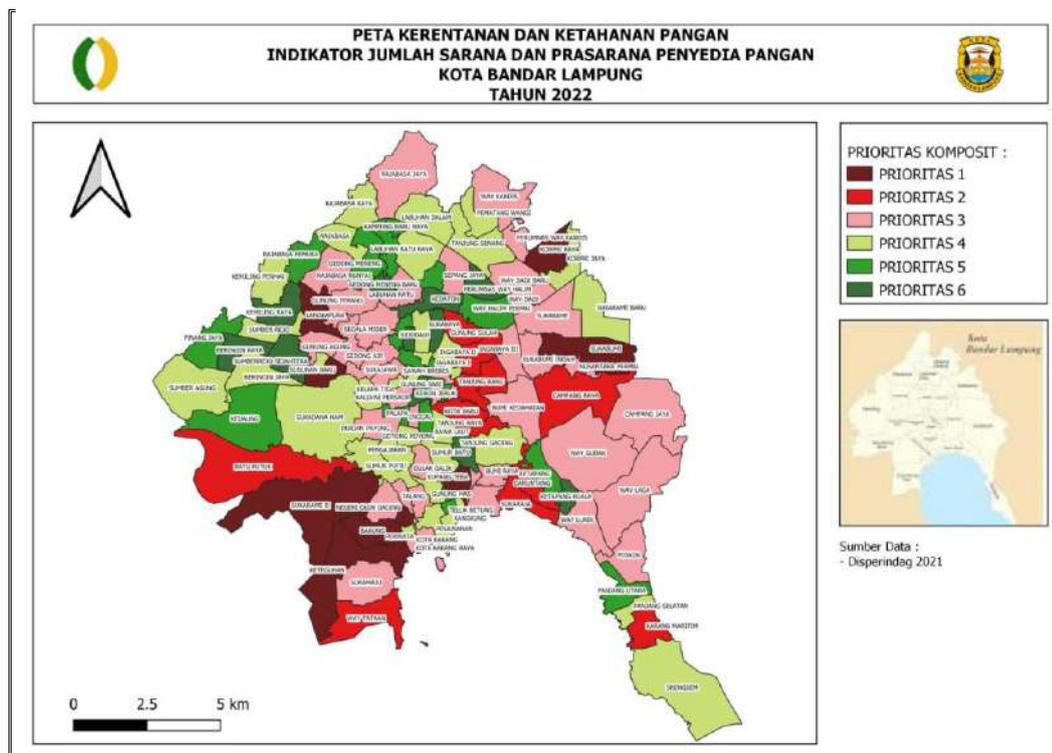
*Tabel 2.1 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan Berdasarkan Prioritas*

Prioritas	Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	0,0250	10	8%
2	0,0319	19	15%
3	0,0515	39	31%
4	0,0740	31	25%
5	0,1028	16	13%
6	> 0,1028	11	9%



**Gambar 2.1 Grafik Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga**

Sejumlah 62 kelurahan berada pada prioritas 1, 2, dan 3 tersebar di beberapa kecamatan yaitu: Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Kedamaian, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Bumi Waras, Langkapura, Rajabasa, Labuhan Ratu, Sukarame, Way Halim, Tanjung Senang, Panjang, Enggal, dan Sukabumi.



Gambar 2.2 Peta Sebaran Rasio Jumlah Sarana dan Prasarana Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2021

## 2.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung per tahun 2020 - 2021 mencapai 2,16% per tahun. Sementara itu rasio sarana dan prasarana penyedia pangan per kelurahan hasil analisis FSVA tahun 2022 mencapai 50% ada pada prioritas 1-3. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai system peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Pembangunan ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung. Yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang adalah:

Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, melalui:

- Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk kota dan wilayah disekitarnya;
- Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi

Kebijakan Kota Bandar Lampung mengenai ketersediaan pangan pada periode 2021-2024 bertujuan untuk:

**Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan**, strategi yang dilakukan adalah:

- A. Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen, dengan arah kebijakan :
  1. Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representative
  2. Meningkatkan Keamanan Perdagangan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce);

3. Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui pengelolaan pasar tradisional dan pasar rakyat serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima

B. Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi, arah kebijakan adalah:

1. Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi
2. Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online

C. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja, arah kebijakan adalah:

1. Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online;
2. Meningkatkan kerjasama daerah.

D. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan;
2. Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura Rakyat;
3. Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran;
4. Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;
5. Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat;

6. Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat.

## **BAB 3**

### **AKSES TERHADAP PANGAN**

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

#### **3.1 Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah**

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Bandar Lampung. Rasio kemiskinan telah bertambah dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan dari 93.740 jiwa (8,81%) tahun 2020 menjadi 98.760 jiwa (9,11%) pada tahun 2021.

*Tabel 3.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bandar Lampung, 2017-2021*

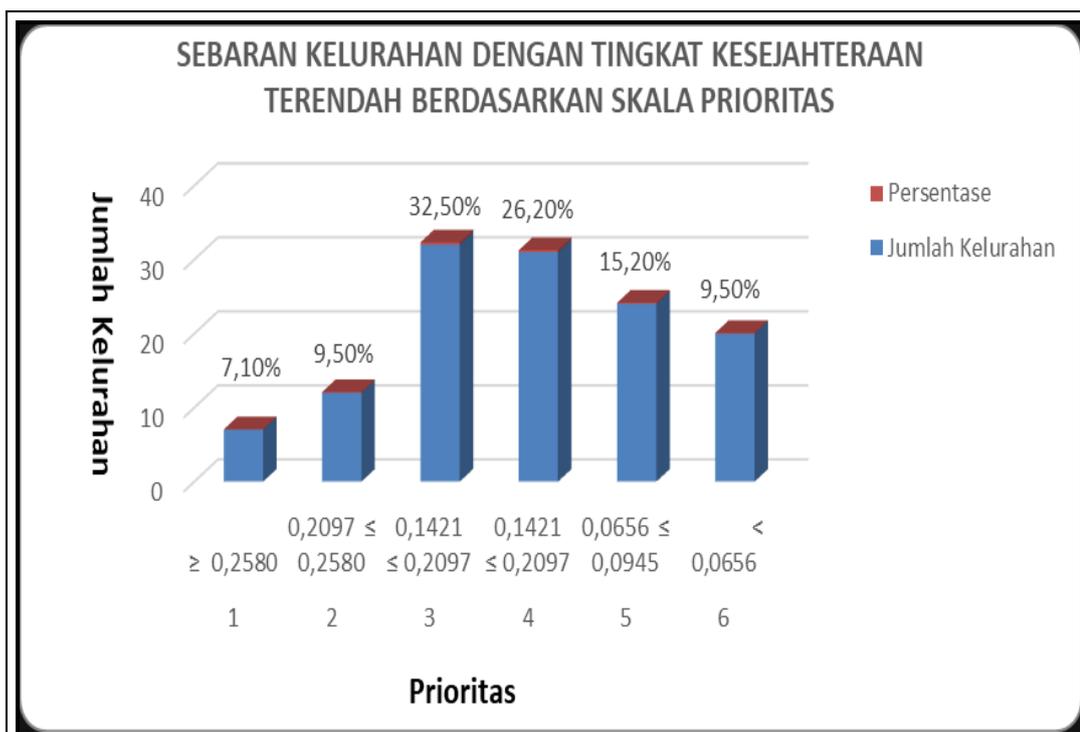
Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan	540.679	562.277	588.177	634.743	654.576
Jumlah Penduduk Miskin (riibu)	100,50	93,04	91,24	93,74	98,76
Persentase penduduk miskin (%)	9,94	9,04	8,71	8,81	9,11

*Sumber: Bandar Lampung Dalam Angka, BPS 2022*

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2021, di Kota Bandar Lampung terdapat 7 kelurahan (5,6%) yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 0,258 (Prioritas 1). Sebanyak 12 kelurahan (9,5%) masuk prioritas 2, dan 32 kelurahan (25,4%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota Bandar Lampung ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 51 kelurahan tersebut.

*Tabel 3.2 Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas*

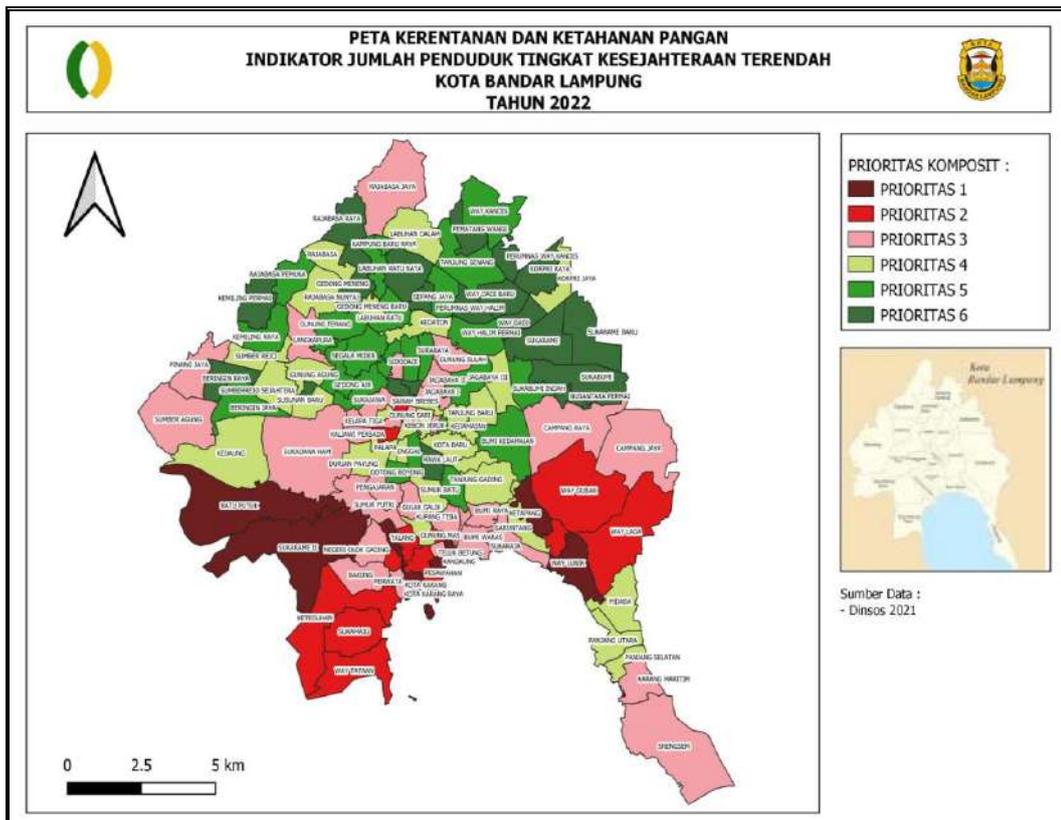
Prioritas	Range Rasio	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	$\geq 0,2580$	7	5,6%
2	$0,2097 \leq 0,2580$	12	9,5%
3	$0,1421 \leq 0,2097$	32	25,4%
4	$0,0945 \leq 0,1421$	31	24,6%
5	$0,0656 \leq 0,0945$	24	19,0%
6	$< 0,0656$	20	15,9%



Gambar 3.1 Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas

Tabel.3.3 Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas

No	Kecamatan	Jumlah Kel. Prioritas						Jumlah Kelurahan
		1	2	3	4	5	6	
1	Teluk Betung Barat	2	1	2				5
2	Teluk Betung Timur	1	3	2				6
3	Teluk Betung Selatan	1	3	2				6
4	Bumi Waras	1	0	3	1			5
5	Panjang	2	1	2	3			8
6	Tanjung Karang Timur			1	4			5
7	Kedamaian				5	2		7
8	Teluk Betung Utara			4	2			6
9	Tanjung Karang Pusat		2	2	2	1		7
10	Enggal			1	2	2	1	6
11	Tanjung Karang Barat			3	2	2		7
12	Kemiling			2	3	2	2	9
13	Langkapura			1	1	2	1	5
14	Kedaton			1	1	3	2	7
15	Rajabasa			1	3	1	2	7
16	Tanjuung Senang				1	2	2	5
17	Labuhan Ratu					4	2	6
18	Sukarame				1		5	6
19	Sukabumi		2	2		1	2	7
20	Way Halim			3		2	1	6



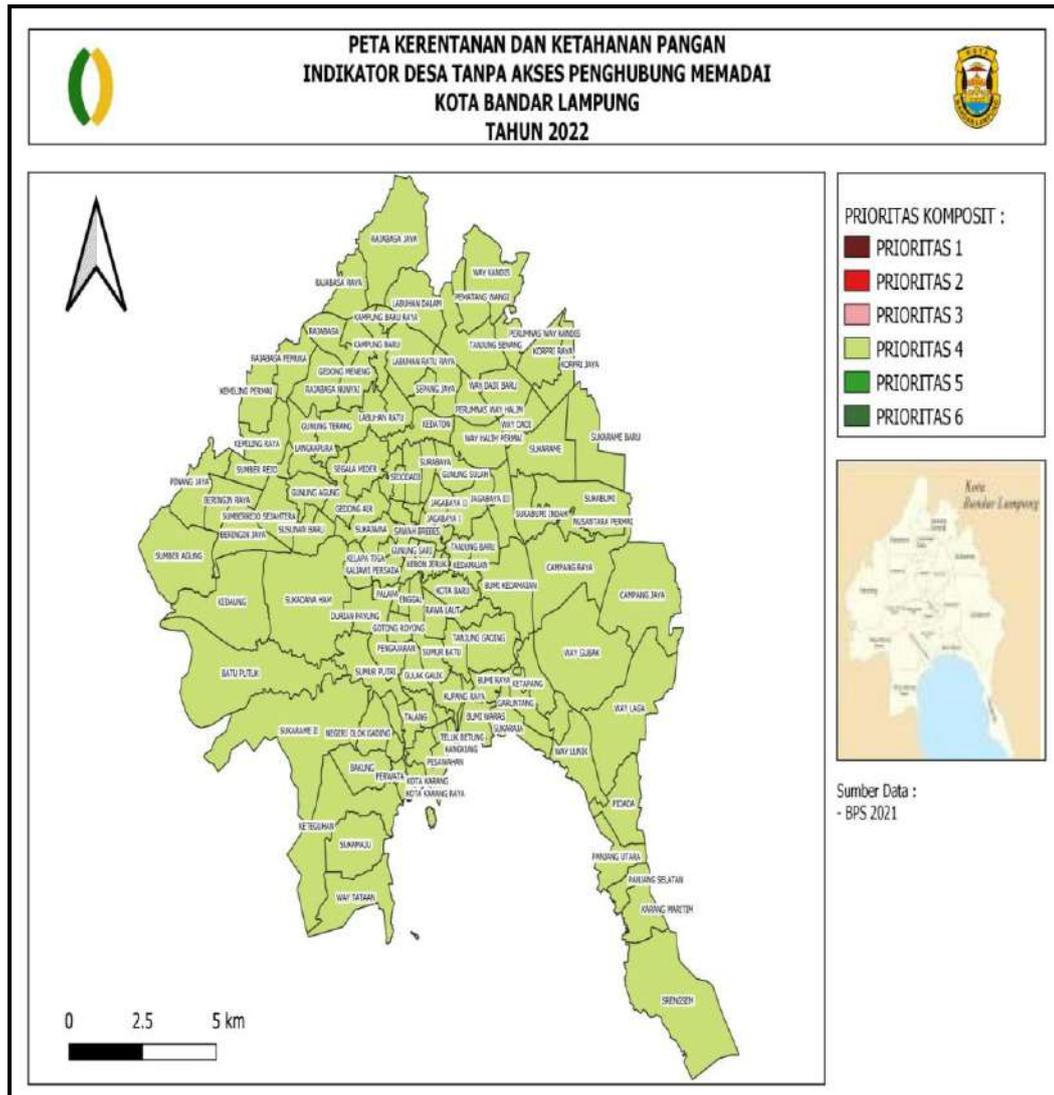
Gambar 3.2 Peta Indikator Rasio Penduduk Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2022

### 3.2 Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok masyarakat ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar

pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan. Akses penghubung (jalan dan jembatan) antar wilayah di Kota Bandar Lampung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Tahun 2021 adalah sangat baik. Dimana semua wilayah terhubung dan memiliki akses penghubung yang memadai yang dapat dilalui sepanjang tahun (Gambar 3.3)



Gambar 3.3 Peta Indikator Kelurahan Yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Memadai Tahun 2022

### 3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 diantaranya, dengan tujuan:

- A. Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas , melalui
  - Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya;
  - Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan ;
  - Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh.
  
- B. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan
  - Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT;
  - Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru;
  - Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi;
  - Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja;
  - Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
  - Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
  - Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS.

## **BAB 4**

### **PEMANFAATAN PANGAN**

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten/Kota, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

#### **4.1 Akses Terhadap Akses Air Bersih**

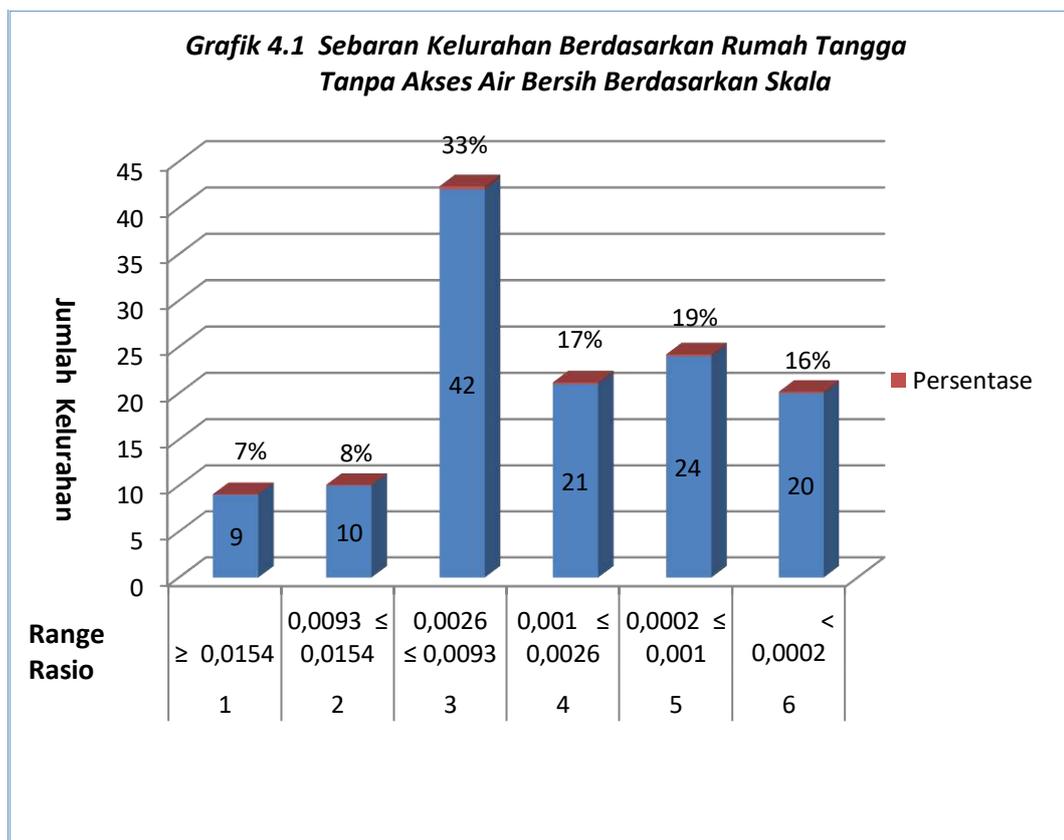
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak<sup>1</sup>. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

---

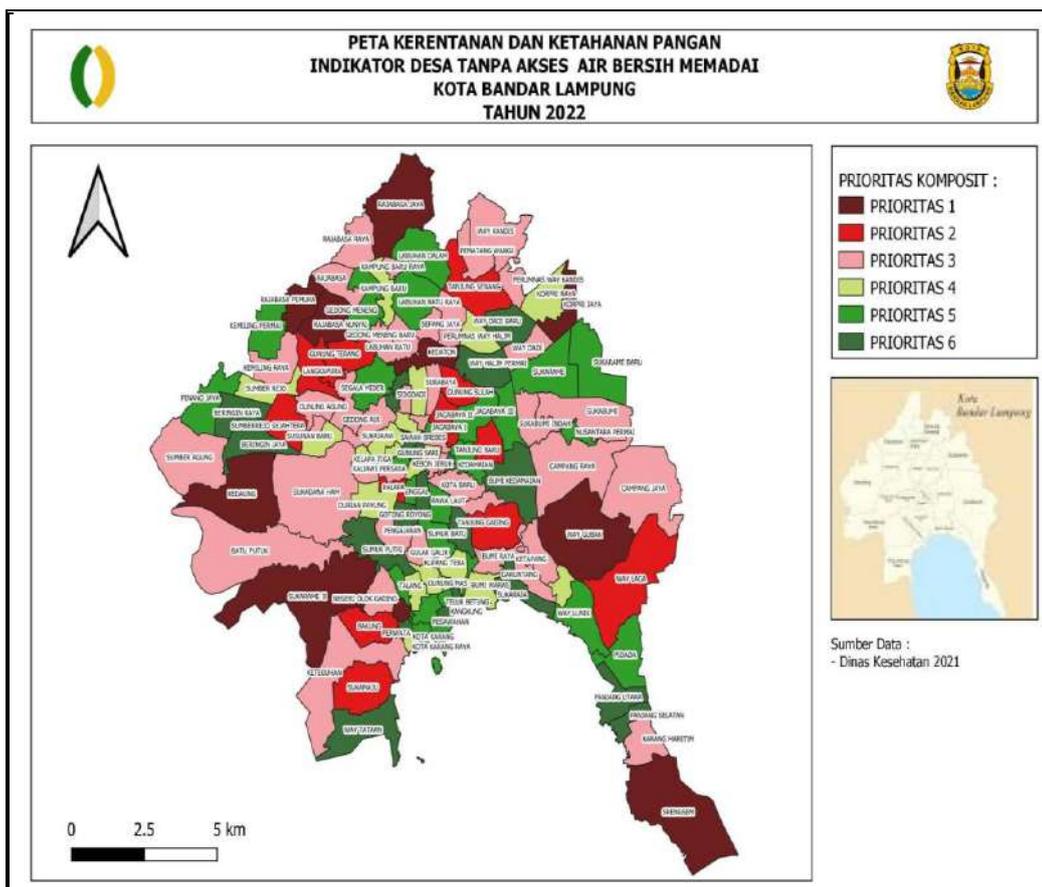
<sup>1</sup> Permenkes 416 Tahun 1990

Tabel 4.1 Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	$\geq 0,0154$	9	7%
2	$0,0093 \leq 0,0154$	10	8%
3	$0,0026 \leq 0,0093$	42	33%
4	$0,0010 \leq 0,0026$	21	17%
5	$0,0002 \leq 0,0010$	24	19%
6	$< 0,0002$	20	16%



Gambar 4.1 Grafik Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022



Gambar 4.2 Peta Indikator Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Kota Bandar Lampung Tahun 2022

#### 4.2 Rasio Tenaga Kesehatan

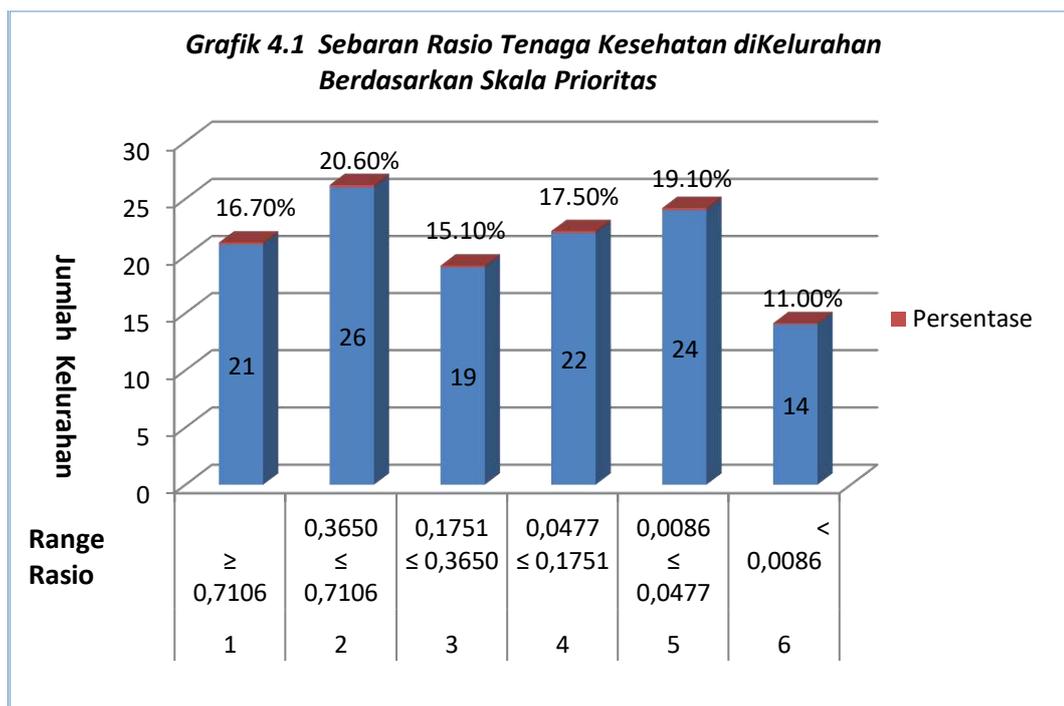
Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang

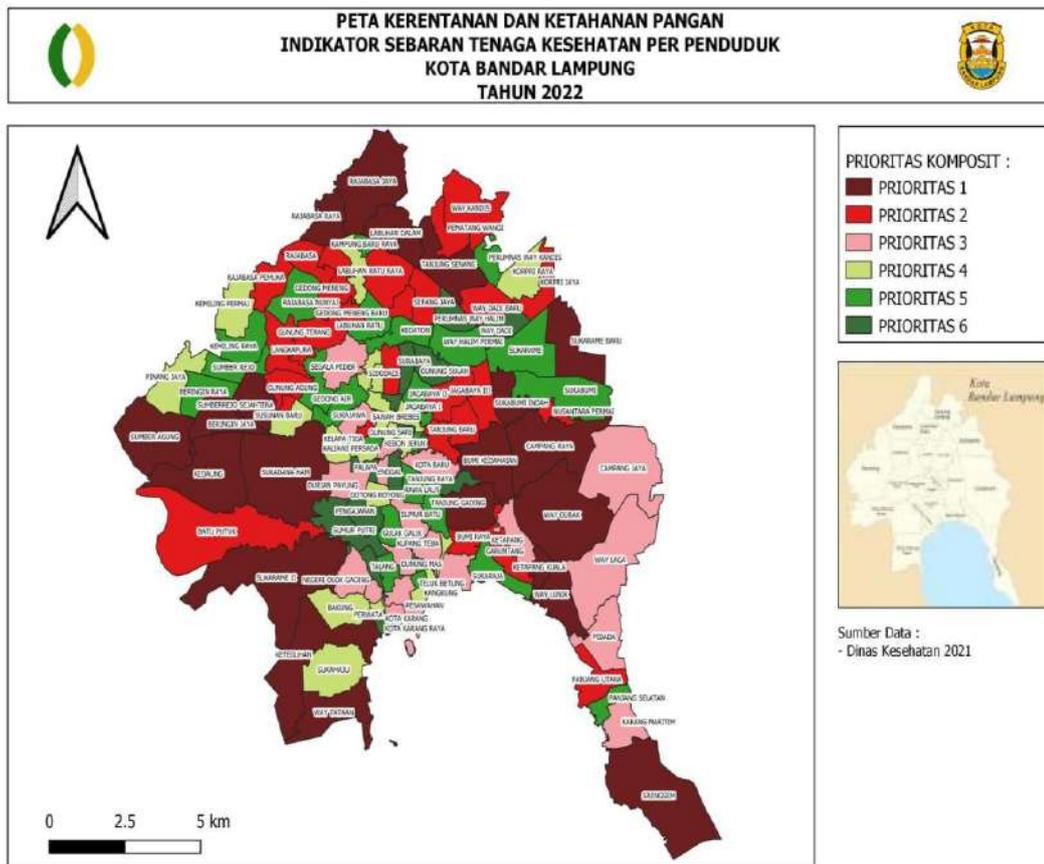
ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

*Tabel 4.2 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas*

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,7106$	21	16,7%
2	$0,3650 < 0,7106$	26	20,6%
3	$0,1751 < 0,3650$	19	15,1%
4	$0,0477 < 0,1751$	22	17,5%
5	$0,0086 < 0,0477$	24	19,1%
6	$< 0,0086$	14	11,0%



*Gambar 4.3 Grafik Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022*



Gambar 4.4 *Peta Indikator Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk Tahun 2022*

### 4.3 Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi ada dua yaitu faktor tidak langsung dan faktor langsung. Faktor tidak langsung antara lain adalah kondisi ekonomi, pendidikan, dan pengetahuan yang mempengaruhi ketersediaan pangan dan pelayanan kesehatan. Faktor langsung antara lain asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi status gizi seseorang.

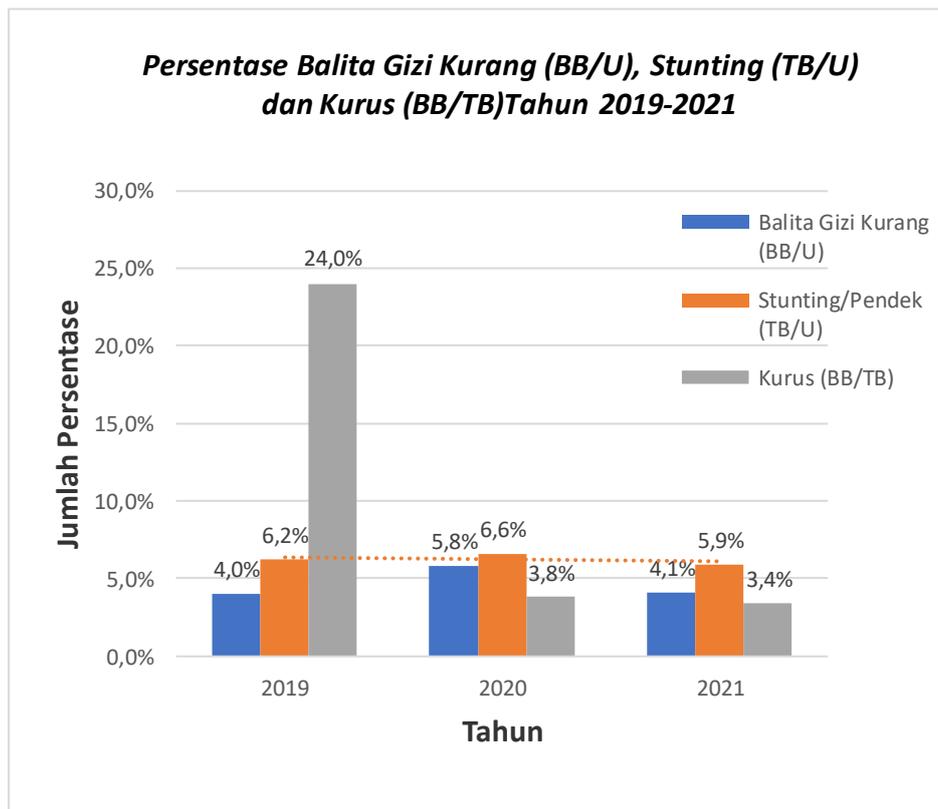
Balita usia 2-5 tahun termasuk dalam kelompok rentan atau rawan gizi. Gizi merupakan faktor penting bagi kesehatan dan kecerdasan anak. Jika pada usia ini status gizinya tidak dikelola dengan baik, maka dikemudian hari kemungkinan

akan terjadi gangguan status gizi buruk dan selanjutnya akan sulit terwujudnya perbaikan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Status gizi pada balita dapat diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

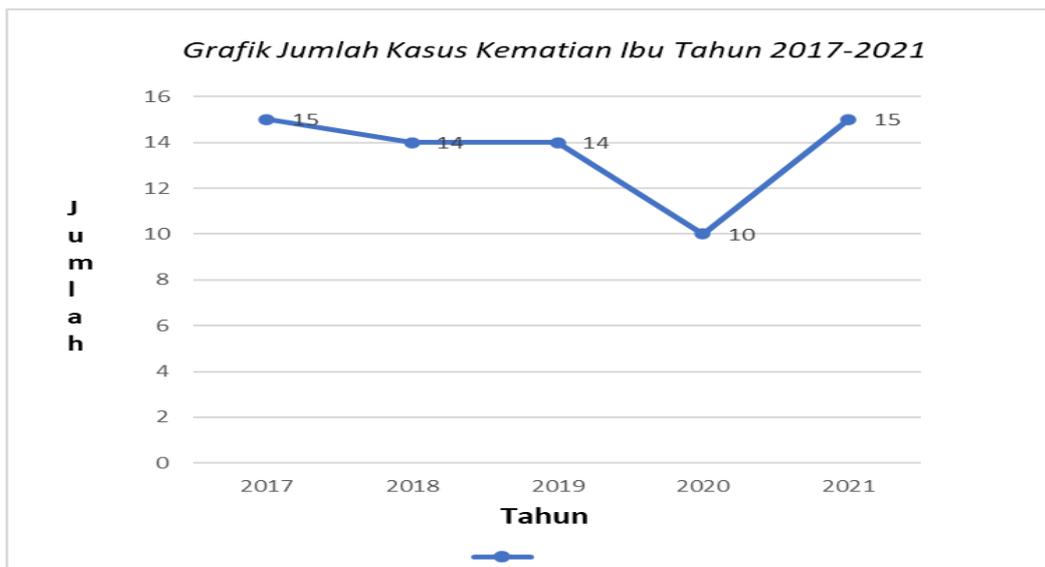
Upaya yang dilakukan oleh Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi masalah gizi kurang (BB/Umur), balita Pendek (Stunting), balita kurus (BB/TB) adalah dengan cara pemantauan pertumbuhan. Dengan melihat perkembangan status gizi balita, dapat diketahui perkembangan dan pertumbuhan anak. Kegiatan pemantauan perkembangan status gizi balita dilaksanakan melalui penimbangan setiap bulan pada balita di posyandu, Puskesmas.

Pada tahun 2021 persentase balita gizi kurang (BB/U) sebesar 4,1%, Stunting (TB/U) sebesar 5,9% dan kurus (BB/TB) sebesar 3,4%. Jumlah balita yang dilakukan operasi timbang sebanyak 50.536 balita. Berdasarkan data ini program Gizi mulai dari tingkat Dinas Kesehatan sampai dengan Puskesmas lebih meningkatkan program SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak), sehingga sejak awal dapat dideteksi penyebab gizi buruk pada balita. Penanganan masalah gizi buruk dan stunting di masyarakat perlu ditangani secara komprehensif oleh sektor kesehatan dan lintas sektor terkait seperti sosial, pemerintahan dan peran serta masyarakat.



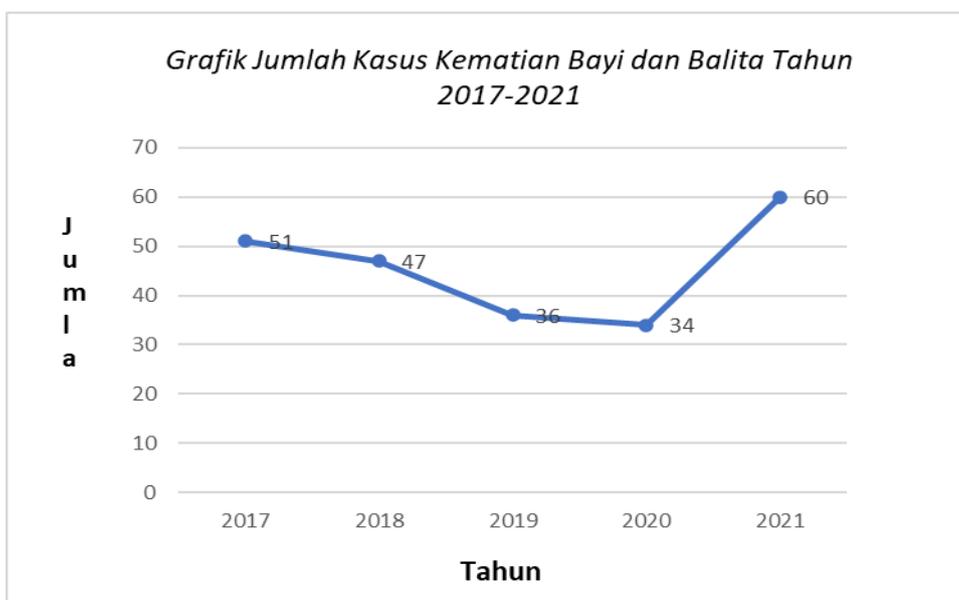
**Gambar 4.5** *Persentase Balita Gizi Kurang (BB/U), Stunting/Pendek (TB/U), dan Kurus (BB/TB)*

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI selain digunakan untuk menilai keberhasilan program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Jumlah kematian ibu di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 sebanyak 15 orang, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 berjumlah 10 orang. Hal ini dikarenakan adanya komplikasi ibu bersalin dengan kasus Covid-19.

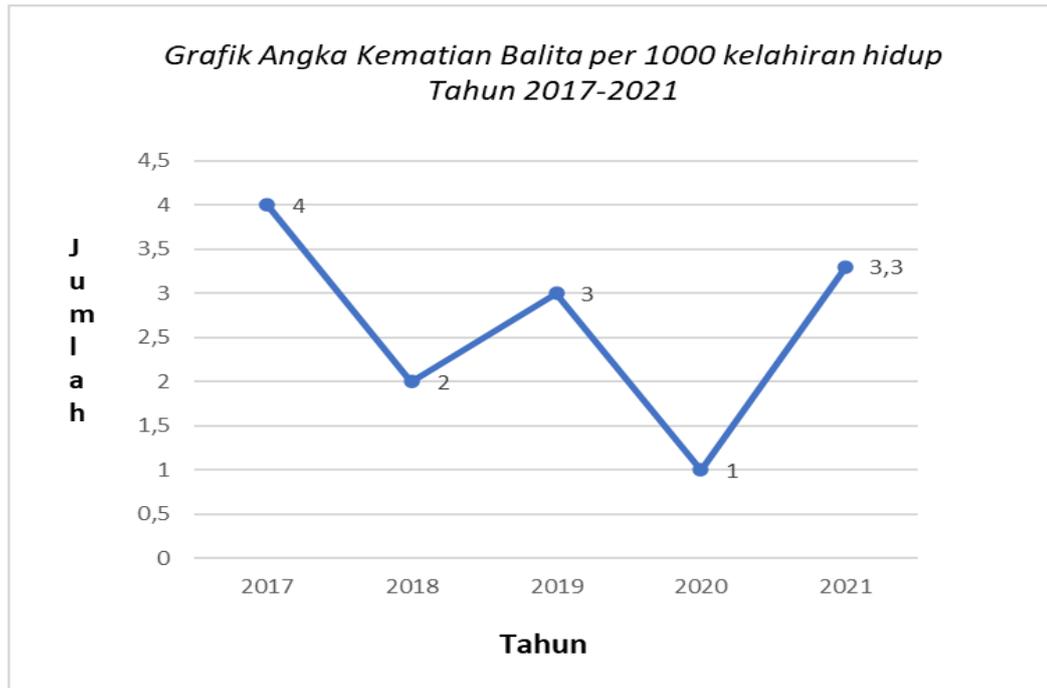


**Gambar 4.6 Kasus Kematian Ibu Tahun 2017-2021**

Salah satu faktor yang menyumbang angka kematian dan menyebabkan masalah stunting pada anak adalah dengan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Bayi BBLR disebabkan oleh kondisi ibu hamil KEK (kurang energi kalori) yang menyebabkan anemia pada ibu hamil. Pada tahun 2021, diketahui persentase bayi berat badan lahir rendah (BBLR) sebesar 1,7% atau terdapat 301 bayi BBLR yang tersebar di 31 wilayah kerja puskesmas. Kejadian BBLR terkait erat dengan kekurangan gizi ataupun kejadian sakit pada saat kehamilan.



**Gambar 4.7 Grafik Jumlah Kematian Bayi dan Balita Tahun 2017-2021**



*Gambar 4.8 Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2017-2021*

#### **4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan**

Strategi untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan masyarakat di Kota Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:

- A. Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif Meliputi Upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, melalui:
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik di Rumah Sakit maupun Fasilitas Kesehatan Lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk Masyarakat \;
  2. Pengembangan Profesionalitas SDM Kesehatan Baik Medis, Paramedis maupun Non Medis melalui Peningkatan Kualifikasi;
  3. Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringanya

4. Meningkatkan Bentuk Kegiatan dengan Pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang Dilaksanakan secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah
  5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Laboratorium yang Memadai
- B. Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1. Mengendalikan Usia Perkawinan Pertama Penduduk
  2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB
  3. Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja

Kasus gizi kronis (*stunting*) masih tetap ada di Kota Bandar Lampung, gizi kronis terjadi akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya

adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

*Tabel 4.4 Rekapitulasi Prevalensi Stunting perKecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2021*

No	Kecamatan	Tahun 2021		
		Jumlah Balita	Stunded	
			Jumlah	%
1	Teluk Betung Barat	2044	10	0,5
2	Teluk Betung Timur	2433	393	16,2
3	Teluk Betung Selatan	1640	153	9,3
4	Bumi Waras	2533	13	0,5
5	Panjang	4098	603	14,7
6	Tanjung Karang Timur	1699	65	3,8
7	Kedamaian	2330	40	1,7
8	Teluk Betung Utara	2427	164	6,8
9	Tanjung Karang Pusat	2747	84	3,1
10	Enggal	1172	34	2,9
11	Tanjung Karang Barat	2245	164	107,3
12	Kemiling	3441	200	5,8
13	Langkapura	2413	110	4,6
14	Kedaton	1522	151	9,9
15	Rajabasa	2776	17	0,6
16	Tanjung Seneng	2744	230	8,4
17	Labuhan Ratu	2764	102	3,7

No	Kecamatan	Tahun 2021		
		Jumlah Balita	Stunded	
			Jumlah	%
18	Sukarame	3518	114	3,2
19	Sukabumi	488	4	0,8
20	Way Halim	2345	46	2,0
	Bandar Lampung	45.137	2.970	6,6

Sumber data :

Rekapitulasi Hasil Operasi Timbang Tahun 2021 Dinas Kesehatan, 2021

Untuk menurunkan *prevalensi stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya dirawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
  - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
  - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani), sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan). Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
    - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (*sprinkle*) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
    - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.

- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
  - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
  - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas- fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
  - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganeekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

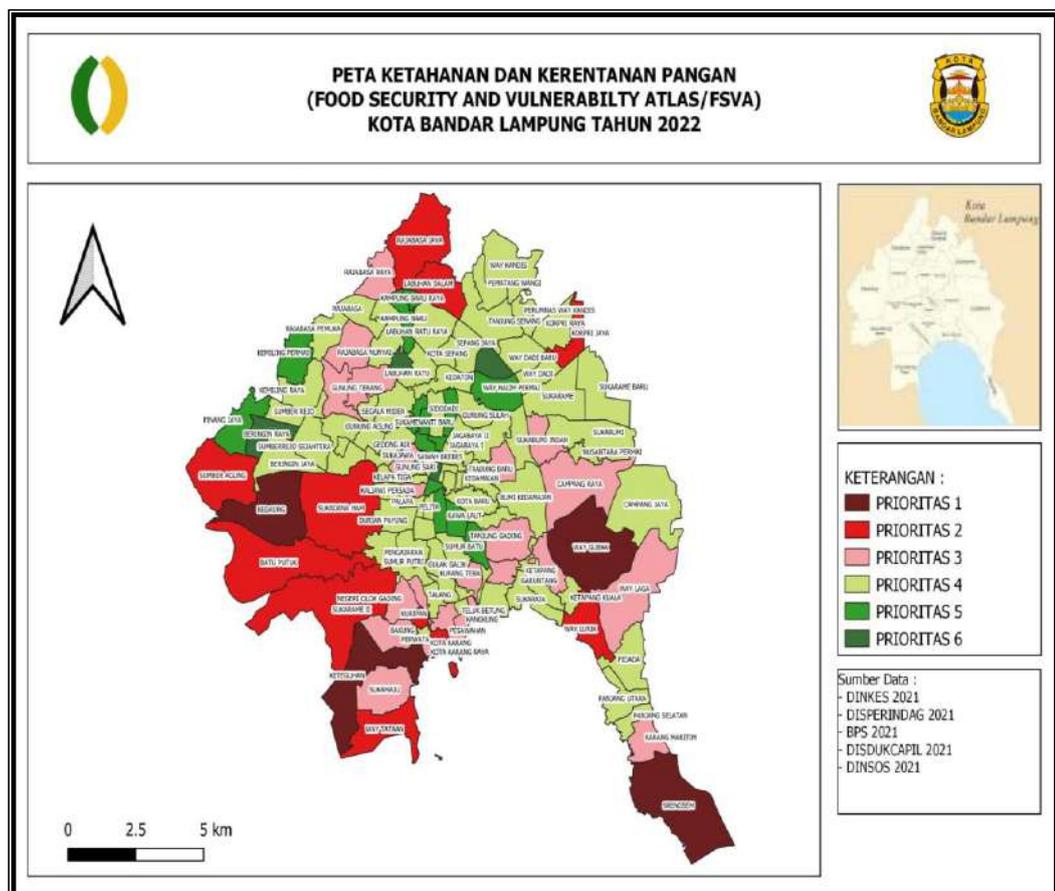
Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang

berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi dibidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

## BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit ditetapkan melalui Analisis Pembobotan. Hasil pemetaan terhadap indikator FSVA dapat dilihat pada Gambar 5.1.



*Gambar 5.1 Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Kota Bandar Lampung 2022*

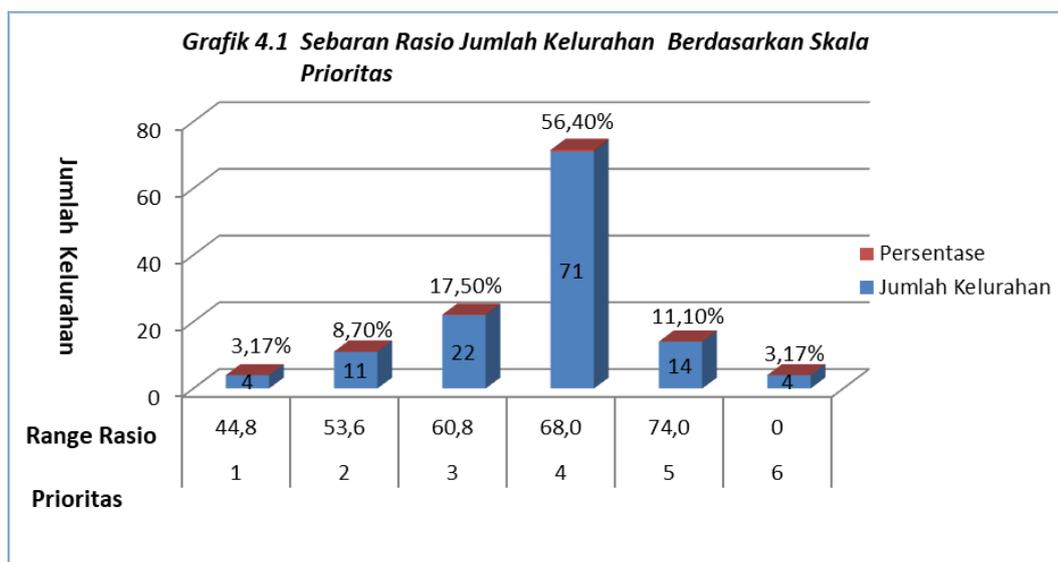
## 5.1. Kondisi Ketahanan Pangan

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (Kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 126 kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung maka didapatkan 4 (empat) kelurahan (Prioritas 1), 11 (sebelas) kelurahan (Prioritas 2), 22 kelurahan (Prioritas 3), 71 kelurahan (Prioritas 4), 14 kelurahan (Prioritas 5) dan 4 kelurahan (Prioritas 6).

*Tabel 5.1. Sebaran Jumlah kelurahan berdasarkan Prioritas*

<b>Prioritas</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Persentase</b>
1	4	3,17%
2	11	8,7%
3	22	17,5%
4	71	56,4%
5	14	11,1%
6	4	3,17%



Gambar 5.2 Grafik Sebaran Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas Tahun 2022

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan :

1. **Prioritas 1** terdapat di wilayah:
  - a. Kecamatan Teluk Betung Timur, yaitu: Kelurahan keteguhan
  - b. Kecamatan Panjang, yaitu Kelurahan srengsem
  - c. Kecamatan Kemiling, yaitu di Kelurahan Kedaung
  - d. Kecamatan Sukabumi, yaitu Kelurahan Way Gubak.
2. **Prioritas 2** terdapat di wilayah:
  - a. Kecamatan Teluk Betung Barat, yaitu Kelurahan: Kuripan, Sukarame II, dan Batu Putu,
  - b. Kecamatan Teluk Betung Timur, yaitu Kelurahan Kota Karang dan Way Tataan;
  - c. Kecamatan Tanjung Karang Barat, yaitu kelurahan Sukadana Ham;
  - d. Kecamatan Kemiling yaitu di kelurahan Sumber Agung;
  - e. Kecamatan Rajabasa yaitu di Kelurahan Rajabasa Jaya;
  - f. Kecamatan Tanjung Senang yaitu di Kelurahan Labuhan Dalam;
  - g. Kecamatan Panjang, yaitu di Kelurahan Way Lunik;
  - h. Kecamatan Sukarame, yaitu di kelurahana Korpri Jaya.

3. **Prioritas 3** terdapat di wilayah:

- a. Kecamatan Teluk Betung Barat, yaitu kelurahan Bakung, dan Negeri Olok Gading;
- b. Kecamatan Teluk Betung Timur, yaitu Kelurahan: Kota Karang Raya, dan Sukamaju;
- c. Kecamatan Teluk Betung Selatan, yaitu: Kelurahan Gedung Pakuwon, dan Pesawahan;
- d. Kecamatan Bumi Waras yaitu di Kelurahan Kangkung dan Bumi Raya;
- e. Kecamatan Panjang, yaitu Kelurahan Karang Maritim dan Ketapang;
- f. Kecamatan Kedamaian, yaitu Kelurahan Tanjung Gading dan Tanjung Baru;
- g. Kecamatan Teluk Betung Utara, yaitu Kelurahan Kupang Teba;
- h. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yaitu Kelurahan Kaliawi;
- i. Kecamatan Tanjung Karang Barat, yaitu Kelurahan Sukajawa;
- j. Kecamatan Langkapura, yaitu Kelurahan Langkapura, dan Gunung Terang;
- k. Kecamatan Rajabasa, yaitu Kelurahan Rajabasa Raya dan Rajabasa Nunyai;
- l. Kecamatan Sukabumi, yaitu Kelurahan Sukabumi Indah, Campang Raya, dan Way Laga

4. **Prioritas 4** terdapat di wilayah:

- a. Kecamatan Teluk Betung Timur, yaitu Kelurahan Perwata;
- b. Kecamatan Teluk Betung Selatan, yaitu Kelurahan Talang dan Teluk Betung, Sumur Putri dan Gunung Mas;
- c. Kecamatan Bumi Waras, yaitu di Kelurahan Bumi waras, Sukaraja dan Garuntang;
- d. Kecamatan Panjang, yaitu Kelurahan Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada dan Ketapang Kuala;
- e. Kecamatan Tanjung Karang Timur, yaitu Kelurahan Kota Baru, Tanjung Agung, Kebon Jeruk, Sawah Lama, dan Sawah Brebes;
- f. Kecamatan Kedamaian, yaitu di Kelurahan Tanjung Raya, Kedamaian, Kalibalau Kencana, Bumi Kedamaian dan Tanjung Agung Raya;
- g. Kecamatan Teluk Betung Utara yaitu Kelurahan: Kupang Kota, Kupang Raya, Sumur Batu, Gulak Galik, dan Pengajaran;
- h. Kecamatan Tanjung Karang Pusat yaitu Kelurahan Durian Payung, Gotong Royong, Palapa, Kelapa Tiga, Pasir Gintung, dan Kaliawi Persada

- i. Kecamatan Enggal yaitu Kelurahan Pelita;
- j. Kecamatan Tanjung Karang Barat yaitu Kelurahan Susunan Baru, Gedong Air, Segala Mider, Sukajawa Baru, dan Kelapa Tiga Permai;
- k. Kecamatan **Kemiling** yaitu Kelurahan Sumberejo, Sumberejo Sejahtera, Kemiling Raya, dan Beringin Jaya;
- l. Kecamatan **Langkapura** yaitu Kelurahan Bilabong Jaya, Langkapura Baru, dan Gunung Agung;
- m. Kecamatan Kedaton yaitu Kelurahan Sidodadi dan Kedaton;
- n. Kecamatan Rajabasa yaitu Kelurahan Gedong Meneng, Rajabasa dan Rajabasa Pemuka;
- o. Kecamatan **Tanjung Senang** yaitu Kelurahan Tanjung Senang, Way Kandis, Perumnas Way Kandis, dan Pematang Wangi;
- p. Kecamatan Labuhan Ratu yaitu Kelurahan Labuhan Ratu, Sepang Jaya, Labuhan Ratu Raya, dan Kota Sepang;
- q. Kecamatan Sukarame yaitu Kelurahan Sukarame, Way Dadi, Way Dadi Baru, Korpri Raya, dan Sukarame Baru;
- r. Kecamatan Sukabumi yaitu Kelurahan Sukabumi, Campang Jaya, dan Nusantara Permai;
- s. Kecamatan Way Halim, yaitu di Kelurahan Jagabaya I, Jagabaya II, Gunung Sulah, dan Jagabaya III.

5. **Prioritas 5** (lima) terdapat di wilayah:

- a. Kecamatan Enggal, yaitu Kelurahan Tanjung Karang, Enggal, Rawa Laut, dan Pahoman;
- b. Kecamatan Kemiling, yaitu Kelurahan Pinang Jaya dan Kemiling Permai;
- c. Kecamatan Kedaton, yaitu Kelurahan Sukamenanti, Surabaya, Sukamenanti Baru, Penengahan, dan Penengahan Raya;
- d. Kecamatan Labuhan Ratu, yaitu Kelurahan Kampung Baru dan Kampung Baru Raya;
- e. Kecamatan Way Halim, yaitu Kelurahan Way Halim Permai.

6. **Prioritas 6 (enam)** terdapat di wilayah:

- a. Kecamatan Enggal, yaitu Kelurahan Gunung Sari
- b. Kecamatan Kemiling, yaitu Kelurahan Beringin Raya;
- c. Kecamatan Rajabasa, yaitu Kelurahan Gedong Meneng Baru;
- d. Kecamatan Way Halim, yaitu Kelurahan Perumnas Way Halim.

## 5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan

Dari 126 kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung, terdapat 89 (71%) kelurahan yang tahan pangan (prioritas 4-6) dan sejumlah 37 kelurahan (29%) dalam kondisi rentan pangan (prioritas 1-3). Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh: (1) tingginya jumlah penduduk yang tidak sejahtera (2) banyaknya rumah tangga tanpa akses air bersih, (3) kurangnya tenaga kesehatan, dan (4) jumlah sarana penyedia pangan yang kurang mencukupi. Perbedaan prioritas pada daerah rawan pangan di sebabkan adanya perbedaan rasio hasil analisis indikator penyebab kerawanan pangan.

Berdasarkan hasil analisis, maka **aspek pemanfaatan pangan** yaitu indikator rasio jumlah tenaga kesehatan per kepadatan penduduk dan rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih memiliki sumbangan terbesar dalam menyebabkan terjadinya kerentanan pangan. Rata-rata skor Indikator Individu, Indeks Ketersediaan, Indeks Akses, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Komposit di Prioritas Rentan (1 - 3) dan Prioritas tahan pangan (prioritas 4—6) adalah sebagai berikut:

*Tabel 5.2 Rata-Rata Skor dan indeks Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pada Kelurahan Rentan Pangan (Prioritas 1—3)*

Jenis Indikator	Nilai Rata-Rata
Skor Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	6,79
Skor Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	59,61
Skor Kelurahan yg tidak memiliki Akses Penghubung	100,00
Skor Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	82,97
Skor Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan	70,48
INDEKS KETERSEDIAAN	6,79
INDEKS AKSES	79,81
INDEKS PEMANFAATAN	76,72
INDEKS KOMPOSIT	54,44

*Tabel 5.3 Rata-Rata Skor dan indeks Indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pada Kelurahan Rentan Pangan (Prioritas 4—6)*

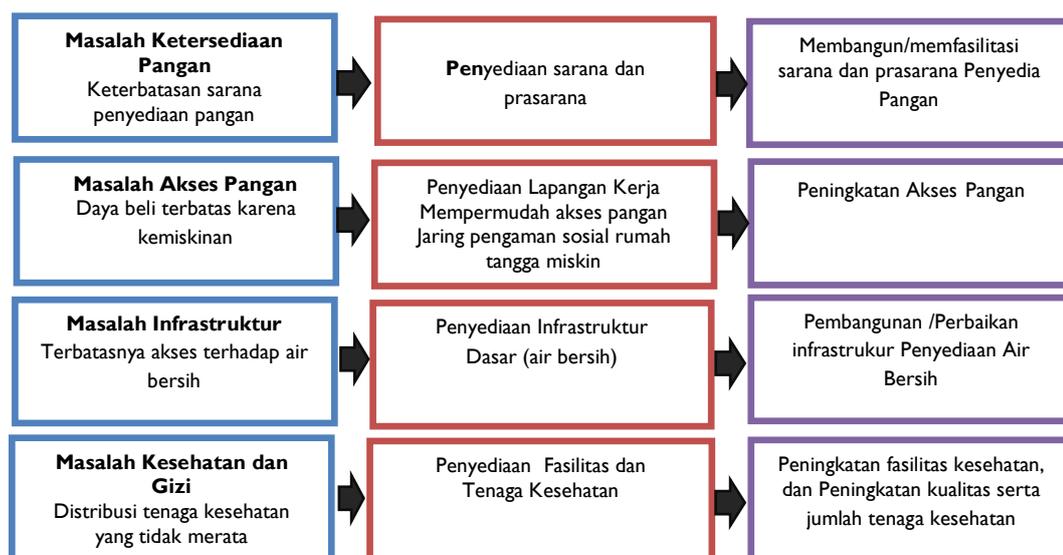
<b>Jenis Indikator</b>	<b>Nilai Rata-Rata</b>
Skor Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	14,94
Skor Rasio Penduduk Tidak Sejahtera	78,78
Skor Kelurahan yg tidak memiliki Akses Penghubung	100,00
Skor Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	95,23
Skor Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan	91,27
INDEKS KETERSEDIAAN	14,94
INDEKS AKSES	89,39
INDEKS PEMANFAATAN	93,25
INDEKS KOMPOSIT	65,86

## BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya. Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kelurahan diprioritaskan pada:

- Kelurahan- kelurahan prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Teluk Betung Barat, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Selatan, Bumi waras, Panjang, Kedamaian, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara, Tanjung Jarang Pusat, Tanjung Karang Barat, Kemiling, Langkapura, Rajabasa, Tanjung Senang, Labuhan Ratu, Sukarame, Sukabumi dan Way Halim.
- Kelurahan-kelurahan yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kelurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini:



*Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan*

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten/kota diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, seminar, bimtek dan lain sebagainya;
- b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih;
- d. Peningkatan jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan, dalam upaya perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat
- e. optimalisasi anggaran ketahanan pangan,
- f. pemantauan dan stabilisasi harga pangan dan pengembangan cadangan pangan.

Ketahanan pangan daerah sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional, pemantapan ketahanan pangan dilakukan dengan peningkatan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan pada program pemberdayaan masyarakat, menguatkan jejaring kerja dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan rumah tangga/keluarga.

Perwujudan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, masing-masing tingkatan pemerintahan melaksanakan kebijakan dan program ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan sesuai dengan mandat dan tupoksinya. Sementara itu, dalam upaya penanggulangan rawan pangan masyarakat diharapkan dapat berperan sesuai dengan kapasitas dan potensinya dan dapat diapresiasi pada

kegiatan pemberdayaan posyandu, dasawisma, kepedulian sosial, kegiatan PKK dan aktifitas sosial keagamaan.

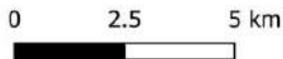
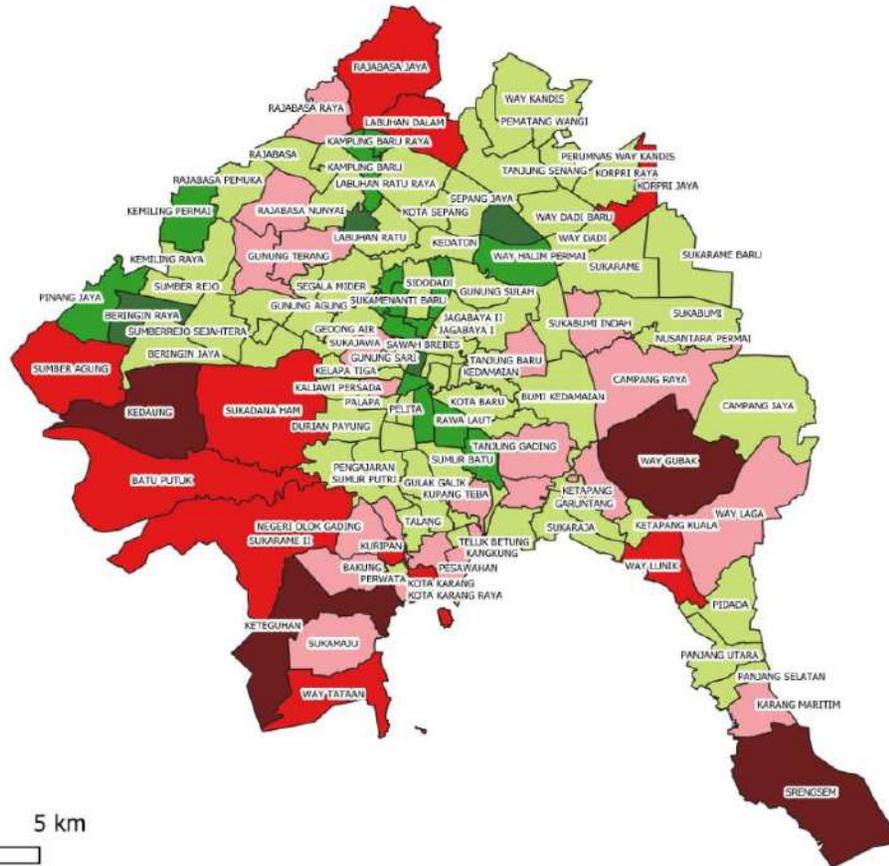
Dalam rangka mewujudkan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan. Pemerintah terus menjaga ketersediaan pangan melalui pilar ketahanan pangan, yang terdiri dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, terjangkau pangan atau memiliki sumber daya untuk mendapatkan pangan, serta penggunaan pangan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizinya.

Hendaknya pemerintah daerah terus mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal di daerahnya masing-masing, khususnya peningkatan produksi bahan pangan baik dari sumber protein hewani maupun nabati. Jangan tergantung pada daerah lainnya, serta mengajak kepada masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras bukan satu-satunya sumber karbohidrat sebagai makanan pokok, masih banyak sumber pangan lokal lainnya yang memiliki nilai gizi yang setara dengan beras seperti sagu, umbian, jagung, dan lainnya.

# LAMPIRAN



## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022



### KETERANGAN :

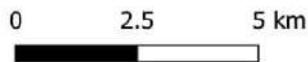
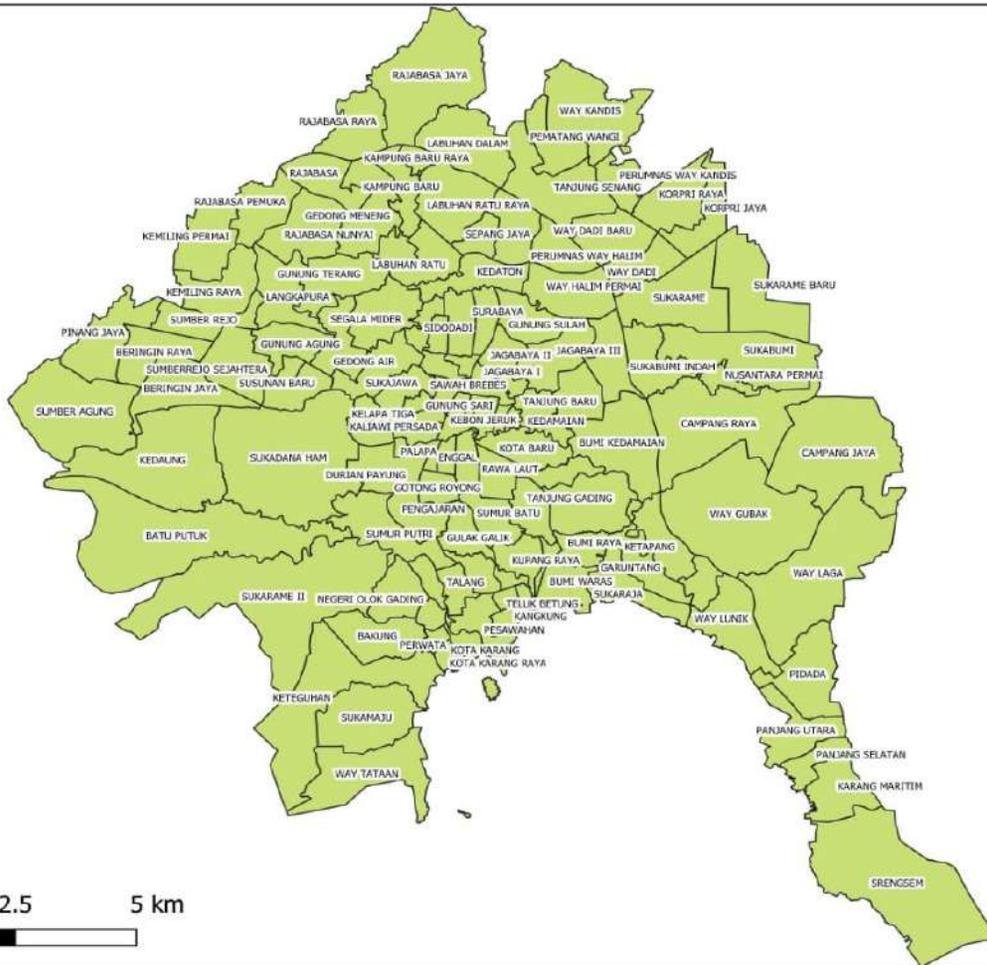
- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6

### Sumber Data :

- DINKES 2021
- DISPERINDAG 2021
- BPS 2021
- DISDUKCAPIL 2021
- DINSOS 2021

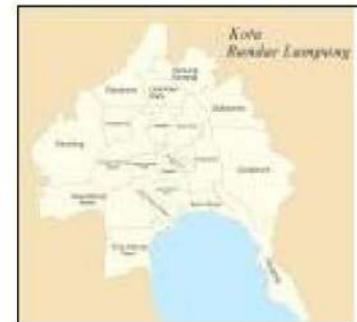


### PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN INDIKATOR DESA TANPA AKSES PENGHUBUNG MEMADAI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022



PRIORITAS KOMPOSIT :

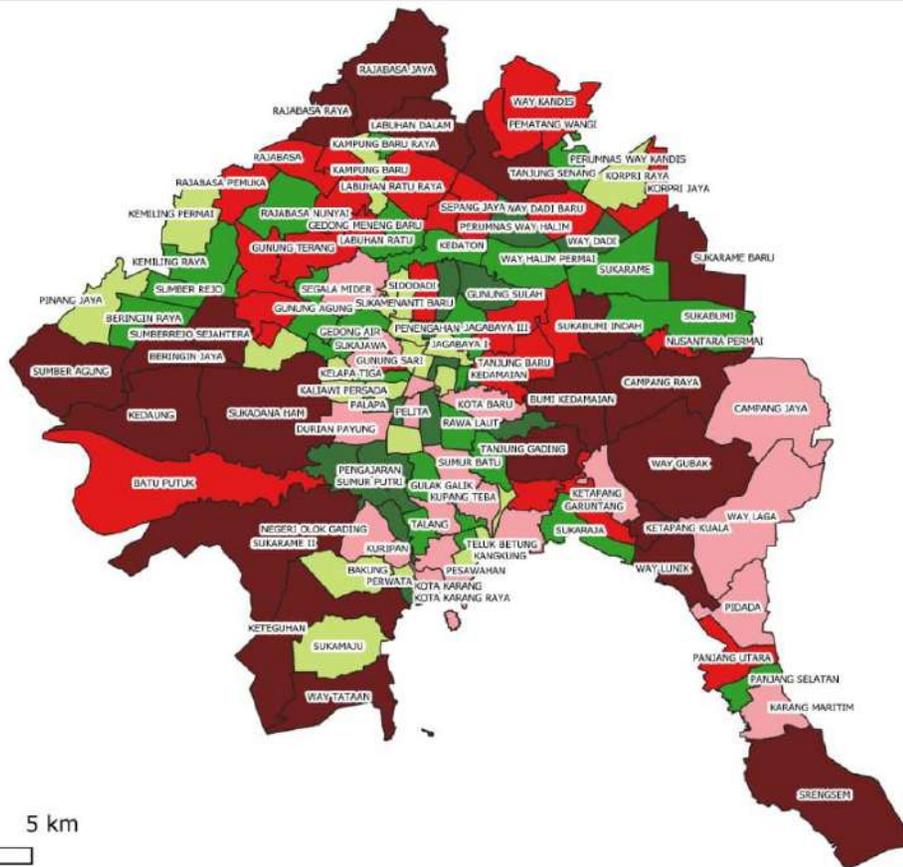
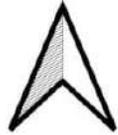
- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6



Sumber Data :  
- BPS 2021



## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS/FSVA) INDIKATOR JUMLAH PENDUDUK PER TENAGA KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022



0 2.5 5 km



### KETERANGAN :

- PRIORITAS 1
- PRIORITAS 2
- PRIORITAS 3
- PRIORITAS 4
- PRIORITAS 5
- PRIORITAS 6

Sumber Data :

- DINKES 2021



